

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada suatu wilayah, kota ataupun negara selalu diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ketenagakerjaan, dan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan dan memperluas kesempatan kerja agar pendapatan dapat terdistribusi secara merata. Menurut Todaro 1988 dikutip oleh (Ningrum 2017) Pembangunan ekonomi merupakan proses yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, kinerja pemerintah atau kelembagaan nasional, dan sikap masyarakat, sebagaimana halnya seperti percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan mutlak.

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu negara atau wilayah. Permasalahan yang sering dijumpai oleh negara-negara khususnya negara sedang berkembang seperti Indonesia yakni tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, dan kemiskinan. Tenaga kerja yang tidak dibekali dengan keahlian dalam bekerja maka akan berpeluang mendapat pekerjaan yang kurang mendukung dalam segi pendapatannya, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kehidupannya. Dengan demikian maka putaran kegiatan ekonomi akan terhambat sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang berdampak pada ketidakmampuan dalam mengeluarkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan. (Ningrum 2017)

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang amat penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis pembangunan ekonomi yang telah atau yang akan dilaksanakan oleh suatu negara/wilayah dan juga dapat dikatakan bahwa ekonomi mengalami pertumbuhan apabila adanya peningkatan dalam sektor barang maupun jasa yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan mensejahterakan masyarakatnya, dan juga menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terus meningkat maka menggambarkan negara/wilayah tersebut memiliki pembangunan ekonomi yang baik. (Ishak 2018)

Dalam teori makro ekonomi, perihal pembahasan masalah pengangguran pada bagian pasar tenaga kerja (*labour market*) yang dihubungkan juga dengan keseimbangan antara tenaga kerja dan tingkat upah. Tingkat pengangguran yang alamiah merupakan suatu tingkat pengangguran yang tidak mungkin dihilangkan dan terjadi secara alamiah. Berarti jika perekonomian inginkan kondisi penggunaan tenaga kerja secara penuh maka tingkat pengangguran paling tinggi sebesar 2-3%. (Sukirno 2016)

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting guna

mengukur maju atau tidaknya sebuah negara/wilayah, selain itu tingginya tingkat pengangguran menunjukkan jika kinerja ketenagakerjaan di daerah tersebut mengalami penurunan. Pengangguran termasuk permasalahan penting untuk dijadikan target penyelesaian oleh pemerintah karena tinggi rendahnya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara,

selain itu pengangguran juga dapat merangsang laju garis kemiskinan. (Sukirno 2016)

Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Berdasarkan pada gambar 1.1 diatas menunjukkan persentase nilai tingkat pengangguran terbuka pada enam provinsi yang terletak pada Pulau Jawa dalam rentang tahun 2011-2020. Dari enam provinsi di Pulau Jawa tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi terletak pada Provinsi Banten dengan nilai rata-rata 9,7 persen, yang kedua Provinsi Jawa Barat dengan nilai 8,9 persen, yang ketiga Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 8,3 persen, juga yang keempat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 5,3 persen, disusul dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,4 persen dan yang terakhir yakni Provinsi DIYogyakarta sebesar 3,5 persen.

Tingkat pengangguran yang mengalami fluktuatif pada Provinsi Banten yang ditunjukkan pada rentang tahun 2011-2020. Persentase kenaikan dan penurunan di tingkat pengangguran terbuka dapat di ketahui pada tahun 2014

tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,47 persen dari tahun sebelumnya dengan nilai 9,07 persen lalu mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 9,55 persen. Meskipun mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih melebihi tingkat nasional.

Pengangguran terjadi akibat dari pertumbuhan angkatan kerja yang melebihi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan penduduk yang bertambah berarti tenaga kerja juga bertambah sehingga dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar. Sedangkan disatu pihak pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penghambat. Selain itu pengangguran terjadi apabila laju pertumbuhan penawaran tenaga kerja lebih tinggidisbanding dengan laju permintaan tenaga kerja. (Sukirno 2016)

Menurut BPS (2020) Provinsi Banten memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terbilang mengalami perlambatan, namun Banten termasuk provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 13,2 juta jiwa yang di dominasi oleh penduduk usia produktif dengan besaran sekitar 57,04%. Potensi sumber daya manusia yang sangat besar ini perlu diimbangi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kurangnya kualitas sumber daya.

Dalam upaya menurunkan pengangguran dan menurunkan kemiskinan keduanya sama penting penanganannya. Secara teori jika masyarakat memiliki pekerjaan dan mendapatkan pendapatan maka penghasilan yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak menjadi miskin. Sehingga dapat dikatakan rendahnya tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan juga ikut rendah. (Garnella, et.al. 2020)

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan, adapun hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan dapat menentukan status pekerjaan seseorang, karena dengan baiknya tingkat pendidikan seseorang maka akan cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas sehingga pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu dengan berpendidikan tinggi, keadaan pengangguran tidak akan separah jika dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, dan dengan berpendidikan tinggi mampu memperoleh upah yang berkisar pada batas minimum. (Effendy 2019)

Selain pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan tingkat pendidikan yang menjadi faktor pengaruh tingkat pengangguran terbuka adalah Upah Minimum Provinsi. Menurut Kaufan dan Hotchkiss, 1999 menjelaskan adapun hubungan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran yakni dengan semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka secara simultan berpengaruh pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Upah minimum

provinsi di Provinsi Banten pada tiap tahunnya mengalami peningkatan namun tingkat pengangguran masih sangatlah tinggi. (Effendy 2019)

Provinsi Banten memiliki keunggulan secara geografis karena memiliki letak wilayah yang strategis dengan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan sebagai gerbang utama penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dapat dikelola dan dioptimalkan kegunaannya dengan membangun kegiatan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang dapat mengurangi jumlah pengangguran juga dapat memberikan efek domino sehingga angka kemiskinan juga menurun.

Pemerintah Provinsi Banten terus mengupayakan cara untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dengan cara membuka kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan dalam berbagai sektor. Cara tersebut dilakukan guna mengimbangi adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Disnakertrans Banten (2021) menyatakan bahwa adanya program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada masyarakat dan membuka beragam peluang kerja di daerah dan juga memberikan pelatihan pada lulusan SMK melalui BLK (Balai Latihan Kerja). Program tersebut dilakukan sebab upaya pemerintah Provinsi Banten secara konsisten membuka 1 juta peluang kesempatan kerja. Namun upaya serta kerja keras Pemerintah Provinsi Banten belum memberi hasil yang maksimal, sebab tingkat pengangguran terbuka di Pprovinsi Banten masih tetap tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fenomena pada tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten yang berada pada urutan ke dua dari 37 provinsi

di Indonesia disebabkan oleh aktifitas ekonomi yang minim, penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi angkatan kerja, serta kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja, kualitas pendidikan yang rendah. Walaupun pada sepanjang tahun Provinsi Banten meningkatkan jumlah industri guna memperluas kesempatan kerja, akan tetapi upaya peningkatan tersebut kurang optimal dan kurang mampu untuk menekan tingginya tingkat pengangguran dan menjadikan Provinsi Banten tetap memiliki jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia. Keadaan tersebut fokus menggambarkan kurangnya upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang tinggi.

Dengan demikian tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah ekonomi yang keberadaannya menarik untuk diteliti lebih lanjut yang nantinya dapat dijadikan jawaban yang secara ilmiah. Berdasarkan latar belakang di muka dan untuk melihat fenomena tersebut maka peneliti melakukan penelitian yakni **“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten”**

1.2. Rumusan Masalah

Pengangguran merupakan masalah yang selalu muncul dalam lingkup suatu negara atau daerah, begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan gambaran pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Penduduk mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?
2. Apakah Kemiskinan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?
3. Apakah Tingkat Pendidikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?
4. Apakah Upah Minimum Provinsi mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Prvinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.

1.4. Ruang Lingkup

Pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berasal dari analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Banten. Penelitian ini berfokus pada besaran persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten yang memperoleh pengaruh dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan, tingkat pendidikan dan upah minimum. Terdapat empat variabel independen yang digunakan dalam riset ini yakni Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Kemiskinan di Provinsi Banten, Tingkat Pendidikan di Provinsi Banten, Upah Minimum Provinsi di Provinsi Banten.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan mempertimbangkan dan perumusan dalam kebijakan untuk menentukan tingkat pengangguran.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan hasil pembahasannya sebagai dasar dalam pembangunan daerah yang tepat guna dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi Banten.

3. Bagi Peneliti dan Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.